

Turnitin Originality Report

Processed on: 26-Mar-2021 09:08 WIB
ID: 1542568443
Word Count: 7339
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
7%	Internet Sources: 7% Publications: 1% Student Papers: 2%

Komunitas Epistemik dalam Isu Perbatasan Indonesia Malaysia: Camar Bulan dan Tanjung Datu By Iva Rachmawati

- 1% match (Internet from 12-Jan-2013)
http://pkailan.com/pdf/Perbatasan_Negara_Full_Report.pdf
- 1% match ()
http://digilib.uinsby.ac.id/24448/3/Nur%20Syamsiah_F02216037.pdf
- 1% match (student papers from 22-Sep-2016)
[Submitted to Defense University on 2016-09-22](#)
- 1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<https://dewiseptianawati.blogspot.com/2012/04/sengketa-daerah-perbatasan-indonesia.html>
- 1% match (Internet from 17-Nov-2018)
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/89/73>
- < 1% match (Internet from 08-Sep-2019)
<https://id.scribd.com/doc/283774944/Jurnal-Kearsipan-Jurnal-Vol-7-2012>
- < 1% match (Internet from 27-May-2020)
<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1190371006-3-Bab%20II.pdf>
- < 1% match (Internet from 06-Jan-2020)
<https://pakarkomunikasi.com/contoh-komunikasi-horizontal-dalam-organisasi>
- < 1% match (Internet from 28-Oct-2020)
<https://pbindoppunisma.com/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-1.pdf>
- < 1% match ()
http://repository.upnyk.ac.id/5228/1/22_Teguh_PertanianUPNYK.pdf
- < 1% match (Internet from 23-Mar-2020)
https://vennas10udayana.com/uploads/1/2/6/6/126666459/all_cluster_edited.pdf
- < 1% match (Internet from 05-Nov-2020)
<https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/20372561/hubungan-malysiaindonesia-masih-terganjal-perkara-batas-negara>
- < 1% match (Internet from 19-Feb-2015)
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/63-oktober-2009/607-media-telah-menjadi-bagian-dari-suatu-proses-politik-yang-kontra-produktif.html>
- < 1% match (Internet from 11-Nov-2020)
<https://www.historieblogg.no/?p=951>
- < 1% match (Internet from 15-Aug-2019)
<https://issuu.com/ayep2/docs/151011/4>
- < 1% match (Internet from 22-Nov-2020)
<https://diperbatasanindonesia.blogspot.com/2012/>
- < 1% match (Internet from 21-Apr-2019)
<http://psikologidansains.blogspot.com/2016/03/>
- < 1% match (Internet from 24-Jan-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/326814133.pdf>
- < 1% match (Internet from 18-Nov-2020)
https://www.researchgate.net/publication/301740749_PENYELESAIAN_SENKETA_PERSELISIHAN_TRADISIONAL_DAN_EKSPRESI_BUDAYA_A
- < 1% match (Internet from 04-Mar-2021)
<https://www.aldp-papua.com/masyarakat-sipil-di-tengah-pusaran-aksi-kekerasan-dan-skema-baru-uu-otsus/>
- < 1% match (Internet from 21-Jan-2021)
<https://pemeriksaanpajak.com/2018/01/10/perokok-wajib-tahu-pemerintah-naikkan-tarif-cukai-hasil-tembakau-1004-persen/>
- < 1% match (Internet from 04-Sep-2018)
<https://es.scribd.com/doc/190379838/4-Juklak-Penilaian-Potensi-Kepemimpinan-Calon-Kepala-Sekolah-Madrasah>
- < 1% match (Internet from 10-May-2012)
http://timur-tengah.com/news/news_article/read/2012/02/03/51/Konvoi.Ban.Ki.moon.di.Gaza.Dilempari.Sepatu
- < 1% match ()
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10896>

Perbatasan negara merupakan kawasan yang sarat dengan gesekan dan tidak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik yang terjadi tidak saja diakibatkan karena klaim tumpang tindih atas batas negara, tetapi juga disebabkan oleh sejumlah persoalan ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan. Artikel ini hendak menyoal peran komunitas epistemik baik yang dibentuk oleh negara maupun aktor non negara dalam memengaruhi kebijakan negara atas kawasan [perbatasan khususnya di Camar Bulan dan Tanjung Datu](#) serta persepsi publik melalui informasi akademis. Melalui metode wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan pada [kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas](#), riset ini menemukan bahwa peran komunitas epistemik masih sangat rendah dalam memengaruhi kebijakan negara dan memperkaya pengetahuan publik atas isu terkait. Rendahnya intensitas relasi pembuat kebijakan dan komunitas epistemik menyebabkan lahirnya pro border policy berjalan lambat. Sementara rendahnya komunikasi intersubjektif terkait isu perbatasan pada kawasan tersebut justru menyebabkan kesimpangsiuran informasi mengenai konflik Tanjung Datu dan Camar Bulan. Kata Kunci Komunitas Epistemik, Perbatasan, Relasi Bilateral. Pendahuluan Konflik yang terjadi antara Indonesia Malaysia terkait dengan perbatasan yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa isu perbatasan masih [menjadi isu yang sensitif di antara kedua negara](#), khususnya Indonesia. Sensitifitas terhadap isu seringkali lebih dipicu oleh ketidakpahaman atas persoalan yang terjadi dan juga kesimpangsiuran informasi yang diperoleh oleh publik domestik. Situasi ini pun memengaruhi hubungan bilateral Indonesia Malaysia selama beberapa tahun meski telah diupayakan didirikannya sebuah institusi guna mengelola kawasan perbatasan melalui KK Sosek Malindo sejak tahun 1983. Isu perbatasan Indonesia Malaysia yang mempengaruhi hubungan bilateral antara lain isu Sipadan Ligitan, Ambalat, Camar Bulan dan Tanjung Datu. Selain itu masih Universitas Udayana, Denpasar, 22 – 25 Oktober 2019 terdapat 9 OBP (Outsanding Border Disputes) yang lain yang berpotensi menyebabkan konflik perbatasan kedua negara. Sejak tahun 2016, isu perbatasan mulai nampak di wilayah Kabupaten Nunukan karena ketidakjelasan titik perbatasan di [Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, B2700 – B3100, Pulau Sebatik; dan C500 – C600](#). Ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Malaysia semakin mendorong keyakinan atas lepasnya sejumlah desa dari Indonesia pada kawasan tersebut (Hidayat, 2016). Keempat isu perbatasan tersebut sempat menjadi isu yang sangat panas di antara kedua negara. Bahkan, isu Ambalat pernah membawa kedua negara dalam sebuah netwar (Madu, 2008). KK Sosek Malindo yang dibentuk untuk mengelola persoalan perbatasan seakan tidak memiliki kemampuan untuk turut serta memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral Indonesia Malaysia terkait isu perbatasan. Hal ini dipengaruhi oleh bidangnya yang hanya bergerak pada isu sosial dan ekonomi, keterbatasan struktur (Rachmawati, 2012) serta sifatnya yang cenderung tertutup (Saidi, 2019). Sementara itu, media bergerak jauh lebih cepat dan provokatif dalam menyebarkan berita (yang beberapa di antaranya tidak benar) dan publik lebih memercayai media yang dianggapnya selalu sahih dalam menyampaikan berita tanpa melakukan konfirmasi ulang atas berita yang diterima. Isu [perbatasan yang terjadi di Camar Bulan dan Tanjung Datu](#) menyisakan persoalan yang tidak jauh berbeda. Keterbatasan pemahaman atas persoalan dan kesimpangsiuran informasi mengenai hal tersebut, mengakibatkan publik mudah mengambil sikap yang serampangan dan justru menyebabkan hubungan kedua negara memburuk (Anon, "Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan", 2011). Informasi mengenai Camar Bulan yang diisukan dicaplok oleh Malaysia bahkan pertama kali dihembuskan oleh seorang anggota DPR (Gultom, 2011) dan Gubernur Kalimantan Barat pada waktu itu (Anon, "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat", 2011). Hal ini mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara memburuk. Sentimen negatif publik semakin meningkat ketika militer mulai dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan Tanjung Datu. Merunut isu yang muncul pada kedua isu yaitu Camar Bulan dan Tanjung Datu nampak bahwa elit politik dan media memberikan pengaruh utama dalam isu perbatasan tersebut. Elit politik yang memberikan pernyataan mengenai kedua isu tersebut lebih mengedepankan nasionalisme tanpa mempertimbangkan akibat dari pernyataan terhadap hubungan bilateral negara. Sementara media tidak memiliki orientasi atas pemahaman publik yang lebih baik mengenai konflik perbatasan yang ada. Media hanya sekedar memuat berita perkembangan konflik terkait bahkan seringkali tanpa informasi yang akurat. Media cenderung menjadi duri dalam daging dengan cara membuat sensasi dari isu yang terjadi dan menimbulkan prasangka buruk dan semakin memperburuk hubungan Indonesia Malaysia (Maidin, 2007) Bayuni, Pemred The Jakarta Post, mengkritisi [media telah menjadi bagian dari proses politik yang kontra produktif](#) (Bayuni, 2009). Sunarti juga menengarai adanya peran media di Indonesia yang begitu reaktif terhadap isu-isu yang berkembang antara Indonesia Malaysia (Sunarti, 2013). Bahkan secara spesifik, Maksum dan Bustami menilai ada 3 media yang terlihat sangat provokatif (isu budaya), yaitu The Jakarta Post, Tempo dan Republika (Maksum, 2014). Lemahnya elit dalam menyajikan isu antar negara secara bijak dan kuatnya media memberikan pengaruh pada publik menimbulkan sebuah pertanyaan atas 'kehadiran' komunitas epistemik' dalam isu perbatasan negara. Selain Eminent Person Group yang pernah didirikan pada masa pemerintahan SBY, artikel ini hendak menyoal 'kehadiran' komunitas tersebut pada isu Tanjung Datu dan [Camar Bulan di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat](#). Metode Penelitian Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan di [kawasan perbatasan Indonesia Malaysia, di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat](#). Riset yang diarahkan untuk mengeni pengaruh komunitas epistemik pada isu perbatasan di Desa Temajuk [yang terletak di Camar Bulan dan Tanjung Datu](#) ini mempergunakan metode studi dokumentasi dan [wawancara](#). Melalui kedua metode tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana komunitas epistemik bekerja dan sejauh mana mereka mampu memengaruhi pembuatan kebijakan mengenai Camar Bulan dan Tanjung Datu. Komunitas epistemik dalam hal ini merujuk pada komunitas yang sengaja dibentuk melalui wadah tertentu dan mereka para pakar yang melakukan riset atas isu perbatasan terkait. Review Literatur/Tinjauan Pustaka Studi mengenai komunitas epistemik pertama kali diperkenalkan oleh Peter M Haas melalui bukunya [Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination](#) pada tahun 1992. Haas merumuskan masyarakat epistemik sebagai sarana untuk mengeksplorasi pengaruh para pakar berbasis pengetahuan dalam pembuatan kebijakan internasional. Selain memiliki latar belakang kepakaran tertentu mereka juga memiliki (1) satu set keyakinan bersama yang normatif dan memiliki prinsip tertentu. Hal inilah yang memberikan kepada mereka sejumlah nilai sebagai landasan bagi [aksi sosial](#) sebagai [anggota masyarakat](#); (2) [berbagi keyakinan, yang berasal dari analisis mereka](#) mengenai sebuah fenomena sosial dan [memberikan kontribusi untuk satu permasalahan dalam domain mereka](#). Hal ini juga [kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan dengan beberapa hubungan antara tindakan kebijakan dan hasil yang diinginkan](#); (3) [memiliki pengertian validitas bersama yaitu, intersubjektif, kriteria internal yang ditetapkan untuk menimbang dan memvalidasi pengetahuan dalam domain keahlian mereka; dan \(4\) praktek umum dalam kebijakan yang terkait dengan serangkaian masalah yang kompetensi profesional mereka yang diarahkan dari keyakinan bahwa kesejahteraan manusia akan ditingkatkan berdasarkan kebijakan tersebut](#) (Haas, 1992). Melalui kepakaran dan kemampuan mereka untuk dapat berbagi nilai/ pengetahuan melalui tindakan intersubjektif memungkinkan komunitas epistemik untuk mengartikulasikan hubungan sebab dan akibat dan membimbing isu-isu untuk debat kolektif dan mengeksplor proyek kebijakan mereka secara global (Dunlop, 2011, p. 1). Penjelasan atas bagaimana mereka dapat berbagi nilai yang sama dan atau memperoleh kesepakatan terdapat dalam pandangan Habermas mengenai tindakan komunikatif. Habermas meyakini tindakan komunikatif dapat dilakukan [karena lawan bicara memiliki lifeworld berupa asumsi dasar yang sama, suatu cakrawala berupa kepercayaan bersama dan tidak dipermasalahkan, dalam konteks solidaritas sosial](#). Melalui tindakan komunikatif ini maka intersubjektifitas dapat mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Peserta sepakat mengenai validitas yang diklaim bagi ucapan mereka atau sepakat mengidentifikasi poin-poin ketidaksepakatan, yang mereka bersama-sama pertimbangkan dalam perjalanan untuk interaksi lebih lanjut. Setiap tindakan ucapan melibatkan pengajuan klaim-klaim validitas yang bisa dikritik yang ditujukan untuk pengakuan/pengenalan intersubjektif (Crawford, 2010, p. 210: 249). Richard Devetak pun menekankan pentingnya masing-masing pihak yang terlibat dalam tindakan komunikatif untuk bersikap terbuka dan bersedia menjadi bagian dari penelitian bersama yang akan menghasilkan prinsip-prinsip dan tatanan-tatanan baru dan institusi-institusi bagi hubungan sosial dan politik. Communicating subject (need) to rationalize or account for their beliefs and actions inters which are intelligible to others and which they can then accept or contest. Similarly, social norms and institutions must also be submitted to scrutiny and argumentation if they are to maintain legitimacy. At such moments when a principle, social norms or institution loses legitimacy or when consensus breaks down, discourse ethics enters the fray as a means of consensually deciding upon new principles or institutional arrangements ... newly arrived at political principles, norms or institutional arrangements can only be said to be valid if they can meet with the approval of all those who would be affected by them (Rengger N., 2000, p. 155). Habermas memandang pentingnya komunikasi dan dialog terbuka semacam ini karena melalui hal inilah manusia mampu

mengkritisi kondisi sosial politik dan ekonomi mereka sendiri, dan membangun wacana baru yang relevan bagi kehidupan bersama. Dialog terbuka dan kesejajaran kesempatan yang ditawarkan oleh iklim demokratis merupakan kunci terbentuknya good society, dimana keadilan menjadi pondasinya. Dengan demikian, upaya ilmuwan kritis untuk menentang pemikiran-pemikiran dominan disebut sebagai proyek emansipatoris karena melibatkan seluruh individu, kelompok dan bahkan kelompok transnasional. Devetak menggarisbawahi bahwa etika wacana ini mesti diletakkan di atas 3 basis, yaitu bersifat universal, demokratis dan bentuk penerapan moralitas praktis yang tidak berdasarkan perhitungan kaum utilitarian tetapi lebih berdasarkan keadilan (Rengger, 2000, p. 155). Dengan demikian, komunitas epistemik merujuk pada status professional dan sosial mereka dimana keberhasilan mereka diukur dari selain sumber daya epistemik mereka tetapi juga ketajaman politik mereka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi pembuat keputusan dan berhasil mengarahkan mesin navigasi pemerintahan dengan mendekati diri mereka kepada para birokrat jika pengetahuan konsensual mereka adalah untuk menginformasikan kebijakan mereka (Dunlop, 2011, p. 3). Studi empiris menunjukkan setidaknya dua yang berbeda tipe-tipe komunitas epistemik - masing-masing dibedakan oleh sejauh mana pembuat keputusan mengerahkan kontrol atas keberadaan mereka (Dunlop, 2011). Komunitas epistemik pada awalnya dipahami sebagai entitas yang mengatur diri sendiri dan merupakan sejumlah ahli yang ada di dunia akademik. Penelitian mereka mulai memasuki arena politik karena menanggapi permintaan pembuat keputusan yang meminta masukan terkait isu tertentu (Haas, 1992). Dalam skenario 'tipikal ideal' seperti itu, komunitas epistemik menawarkan sebuah kebijakan melalui sebuah proposal yang bersifat substantif. Pada tipe kedua, komunitas epistemik adalah mereka yang dengan sengaja dipilih oleh pemerintah atau pembuat keputusan untuk membenarkan keputusan kebijakan yang telah ditentukan. Pada perkembangan selanjutnya, komunitas ini semakin memiliki pengaruh yang kuat dalam memengaruhi arah kebijakan negara. Maia berpendapat bahwa, pertama, semakin pentingnya jenis aktor ini dalam dunia yang semakin mengglobal (Mai'a, 2013). Mereka tidak hanya mempengaruhi pemerintah, tetapi juga aktor non-negara lainnya dengan kekuatan pengambilan keputusan. Komunitas epistemik berada di garis depan yang diakui dan merekalah pedoman menuju pemerintahan transnasional. Mereka juga merupakan sarana utama yang digunakan pengetahuan menjadi kekuatan. Kedua, guna memahami kekuatan dan kelemahannya maka harus memperhatikan dinamika internal dalam komunitas epistemik tersebut. Komunitas epistemik tidak hanya ada atau tidak ada, tetapi memiliki berbagai tingkat pengaruh; dan untuk membangun ini, lebih lanjut penelitian komparatif diperlukan. Maia yakin bahwa komunitas epistemik yang lebih kohesif di dalam masyarakat akan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada kebijakan (Mai'a, 2013). Ketiga, untuk memahami bagaimana pengaruh komunitas epistemik terhadap pembuatan kebijakan maka perlu dipahami bagaimana kondisi dan ruang lingkup komunitas epistemik serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan komunitas epistemik. Sayangnya, untuk mengidentifikasi komunitas epistemik tidaklah mudah (Wright, 1997). Hambatan yang bersifat praktis, seperti mengidentifikasi, menemukan dan mendapatkan akses ke mereka yang diyakini sebagai anggota komunitas epistemik, mungkin dapat menggagalkan upaya untuk terlibat dengan pendekatan sebagai alat analitis. Namun, perpaduan antara keyakinan dan keahlian khusus mereka membedakan komunitas epistemik dari kelompok kepentingan dan jaringan kebijakan (Haas, 1992, p. 22), memungkinkan mereka untuk membuat klaim yang sah sebagai produsen utama pengetahuan di bidang terkait. Dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, pengaruh positif komunitas epistemik sebagai katalisator pembangunan perbatasan sekaligus katalisator bagi hubungan bilateral yang positif menjadi sebuah kebutuhan. Selain itu, pada situasi di mana elit dan media yang berlomba untuk memperoleh perhatian publik, maka kehadiran komunitas epistemik tidak hanya menjadi titik tolak utama pemerintah dalam membuat kebijakan tetapi juga menjadi arena dimana publik dapat belajar dan dapat memperoleh informasi yang jauh lebih sahih. Pada isu perbatasan Indonesia Malaysia, komunitas epistemik dapat ditengarai dalam dua bentuk, mereka yang tergabung secara formal dalam institusi tertentu dan mereka yang melakukan komunikasi intersubjektif melalui tulisan / riset secara individual. Melalui dua hal tersebut maka pengaruh mereka sedikit banyak dapat dilihat terhadap pembuatan kebijakan terkait dengan perbatasan (Camar Bulan dan Tanjung Datu) serta dampak hasil kajian mereka terhadap pemahaman publik mengenai isu perbatasan tersebut. Hasil dan Pembahasan Hubungan Komunitas Epistemik dan Pembuat Kebijakan dalam Isu Perbatasan Sebuah komunitas epistemik untuk mengelola hubungan Indonesia-Malaysia pernah dibentuk oleh negara pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Eminent Person Group atau EPG dibentuk untuk menemukenali persoalan Indonesia Malaysia dan memberikan solusi atas persoalan tersebut. Pada pertemuan ke 5 Indonesia-Malaysia Annual Consultation di Putrajaya 11 Januari 2008, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk mengadopsi pendekatan yang baru dalam hubungan kedua negara dan membangun kerjasama strategis demi kepentingan bersama. EPG yang dibentuk [pada tanggal 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur](#) ditujukan sebagai sebuah lembaga penasihat informal. EPG [terdiri atas orang-orang yang memiliki latar belakang](#) profesional dalam bidangnya dan berada di luar jaring kekuasaan negara. Mereka [terdiri atas orang-orang yang memiliki latar belakang](#) bidang pendidikan dan budaya serta pengalaman sebagai praktisi dalam hubungan antar negara. Dalam konsepsi etika wacana Habermas, institusi ini adalah wadah dimana setiap aktor dapat melakukan dialog terbuka untuk mengusulkan sebuah analisis atas sebuah fenomena, mengusulkan norma atau pertimbangan-pertimbangan lain secara terbuka dan seajalah (Richard, 1996, p. 171). Tugas utama dari EPG ini adalah menghasilkan rekomendasi guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta mengidentifikasi isu-isu yang mungkin dapat menjadi potensi masalah bagi kedua negara.. Dengan kata lain, EPG merupakan "early warning system" yang memberikan masukan kepada pemerintah kedua negara mengenai persoalan yang seringkali muncul di antara keduanya. Selain mengidentifikasi isu-isu penting, EPG juga harus dapat mengajukan mekanisme bagi upaya untuk menyingkirkan persoalan yang ada melalui niat baik dan saling kesepahaman serta kolaborasi antar dua negara. EPG ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting dalam menanggapi hubungan Indonesia Malaysia yang dinilai memburuk pada tahun 2002. Ada 9 sektor yang ditengarai dapat memberikan kontribusi penting dalam perbaikan hubungan kedua negara. Dalam Report of Eminent Person Group yang dikutip oleh DR. Musni Umar 9 rekomendasi tersebut meliputi: (a) Memperkuat people to people contact dan komunikasi, melalui: Pertukaran kunjungan dan study tour, seminar dan dialog, menggiatkan sektor swasta dalam berbagai kegiatan konser budaya dan permainan dan mempublikasikan aturan melalui booklet dan pamphlet serta media. (b)Media, melalui talks show dan workshop mengenai isu yang sedang berkembang untuk meningkatkan saling pemahaman, interaksi regular melalui media lokal, intermedia dialog dan diskusi bersama antar pemerintah dan media serta pertukaran jurnalis, berita dan artikel (c) Isu imigrasi, melalui penyelenggaraan pertemuan regular untuk bertukar informasi mengenai masalah imigrasi dan pemecahannya, penyelenggaraan pertemuan regular antara petugas terkait untuk mengkoordinasikan informasi dan pelanggaran perbatasan yang terjadi, penyelenggaraan pertemuan regular antara institusi terkait dst. (d) Kerjasama bidang ekonomi, melalui expo dan joint trade mission ke negara ketiga, Halal Trade Center, mengharmonisasikan hukum keuangan Islam, konsultasi regular antara intitusi keuangan Islam dan pertukaran pengalaman dan manajemen tabungan haji, pelatihan bersama dalam SME dan mengorganisasikan bersa expo SME dan bekerjasama dalam program CSR dan program pendanaan untuk bisnis. (e) Kerjasama bidang kebudayaan, melalui publikasi bersama, diskusi regular, konser Muhibbah dan kompetisi music bagi pemuda serta program homestay bagi pemuda., dialog "Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Antar Bangsa", pertukaran guru dan mendirikan Pusat Riset Budaya Indonesia-Malaysia, workshop manajemen budaya warisan bersama dan workshop mengenai penyerapan nilai-nilai warisan budaya di kalangan kaum muda dan bekerjasama dalam promosi budaya dan produksi film dan dokumentasi budaya. (f) Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, melalui penyediaan beasiswa bagi pelajar, guru dan peneliti dari Indonesia dan Malaysia, kerjasama dalam bidang kurikulum dan pertukaran guru/dosen, pendirian Pusat Riset Indonesia-Malaysia serta kerjasama dalam riset budaya dan sejarah serta pertukaran program dan kunjungan ahli budaya. (g) Kerjasama bidang pariwisata, melalui ecotourism, culturetourism dan pilgrimtourism, festival budaya, bazaar dan pameran pariwisata untuk meningkatkan industry pariwisata, pertukaran ahli pariwisata, tour agent, dan travel guide dalam rangka meningkatkan kemampuan institusi pariwisata dst. (h) Kerjasama bidang olahraga. Serta (i) Pembangunan yang berkelanjutan dan konservasi biodiversity (Umar, 2011) Sayangnya, EPG tidak secara spesifik menyoal perbatasan dan pengelolaan relasi terkait dengan isu perbatasan. Dan EPG tidak berumur panjang, ia bubar setelah Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi menjabat sebagai presiden. Selain, komunitas epistemik ini bekerja sangat singkat, ia tidak memberikan pengaruh / perubahan yang cukup berarti pada hubungan Indonesia Malaysia. Jauh sebelum EPG terbentuk, sesungguhnya negara telah membentuk institusi khusus mengenai isu sosial dan ekonomi perbatasan yaitu KK Sosek Malindo yang sudah berdiri semenjak tahun 1983. Meski tidak smeuanya merupaakn pakar khusus mengenai perbatasan negara, KK Sosek

Malindo setidaknya berisi mengenai orang-orang yang mengelola perbatasan secara langsung yaitu aktor subnasional yang berada di level propinsi. Semenjak berdiri dari tahun 1983, kelompok ini bekerja untuk betukar pikiran dan menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai kerjasama di sektor sosial dan ekonomi perbatasan. Tujuannya adalah tidak lagi terjadi persoalan di perbatasan seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal, pelanggaran perbatasan negara dan terjalannya hubungan bilateral yang lebih baik pada level subnasional. Sayangnya kinerja langsung institusi ini juga belum dapat dirasakan secara langsung bagi pembangunan kawasan perbatasan, khususnya Indonesia. Apa yang terjadi justru semakin tergantungnya masyarakat perbatasan di Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Temajak, baik di Camar Bulan, Maludin dan Sempadan. Sebagian besar kebutuhan pokok mereka diperoleh dari Malaysia. Selain harga yang lebih murah, kondisi alam yang sulit membuat mereka lebih memilih mendapatkan barang kebutuhan pokok dari Malaysia (Ibrahim, 2019; Harun, 2019; Herlin, 2019). Demikian pula dengan pembangunan perbatasan sebagai bagian dari tujuan didirikannya KK Sosek Malindo ini tidak nampak terjadi di kawasan perbatasan Desa Temajak. Tugas dan tanggung jawab KK Sosek Malindo antara lain, 1. Menentukan proyek pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan kriteria berikut: a) Proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan di wilayah perbatasan bersama. b) Proyek yang akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak dan mereka dapat menggunakannya bersama. c) Proyek bisnis bersama. 2. Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan. 3. Merumuskan pertukaran informasi dengan negara tetangga (Malaysia-Sarawak) tentang proyek pembangunan sosial-ekonomi di setiap wilayah perbatasan bersama. 4. Menyampaikan laporan kepada gubernur Kalimantan Barat dan KK Sosek Malindo di tingkat menengah tentang administrasi pembangunan sosial-ekonomi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tujuan kerja sama KK Sosek Malindo adalah untuk mengembangkan wilayah perbatasan dan menjaga hubungan antara kedua negara. Melalui kerja sama tersebut, masalah perbatasan dapat diselesaikan dengan cara yang baik, serta masalah perbatasan yang sering mengganggu hubungan mereka. Sayangnya, kinerja KK Malindo belum menyentuh level terendah, yaitu desa. Anggota KK Sosek Malindo adalah aktor pada level justru mereka yang paling memahami persoalan perbatasan dan memiliki hubungan personal yang jauh lebih dekat dengan kolega mereka di Malaysia. Selain itu, kerja sama tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan pembangunan di wilayah perbatasan. Rachmawati dan Fauzan (Rachmawati, 2012) mengidentifikasi bahwa ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, dari segi teknis, adanya rencana koordinasi yang tidak dapat mewujudkan rencana menjadi tindakan karena KK Sosek Malindo Indonesia berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua, di sisi substantif, GBC masih menggunakan pendekatan keamanan, bukan pendekatan kesejahteraan. Ini memiliki sifat KK Sosek Malindo yang belum dibuka, yang menantang untuk mendapatkan hasil pertemuan KK Malindo (Wawancara Mendalam, Manto Saidi, Bekas kantor pusat BPPD, di Pontianak April 2019). Hal itu menyebabkan tidak ada kontrol dan evaluasi terhadap hasil implementasi KK Sosek Malindo. Sementara itu, Wirawan menyatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya KK Sosek Malindo adalah perbedaan interpretasi terhadap pembangunan di wilayah perbatasan antar instansi. Misalnya, tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu) mengusulkan akses untuk dapat membeli listrik dari Malaysia karena pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara terbatas. Namun, proposal ini ditolak oleh Pasukan Militer Indonesia karena mereka pikir itu bisa membuat Indonesia bergantung pada Malaysia. Dari riset Wirawan justru aktor elit secara personal memiliki kontribusi yang signifikan atas pembangunan di kawasan perbatasan dan hubungan bilateral (Wirawan, 2019). Sejumlah wawancara yang dilakukan juga menunjukkan bahwa relasi bilateral justru dikelola oleh mereka aktor subnasional pada level kecamatan atau bahkan desa melalui apa yang mereka sebut sebagai muhibah. Selain untuk memelihara relasi, muhibah juga berguna untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di Kawasan Temajak. "Maka saya untuk menghilangkan konflik-konflik ini saya muhibah dengan tumenggungnya, imigresennya, termasuk TNI nya pokoknya muhibahlah. Untuk Tanjung Datu ini saya muhibah dengan dia di Melano saya kesana dengan rombongan. Ndak masalahlah saya muhibah kesana. Kalo di Sajingan memang saya lakukan muhibah dengan rombongan dari kabupaten makanya agak aman.... Kalo jaman saya aman saja karena saya buka muhibah saling komunikasi, ndak usah tegang. Supaya terlihat segala sesuai itu aman tenang, Ni kalo apa apa pake mengerahkan pasukan keamanan masyarakat kita ni takut. Kalo takut, mulailah menganggap daerah itu ndak aman. Kaya daerah Aceh Papua. Ndak ada kenyamanan masyarakat." (Usman, 2019). Peran aktor subnasional ini justru sangat penting guna meredakan konflik dan membuat konflik tidak meluas apalagi menjadi konflik nasional. Pada sebuah wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat daerah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang memang cukup diselesaikan pada level bawah, karena jika diselesaikan di tingkat nasional justru akan menjadi rumit karena sudah melibatkan ego kebangsaan. Hubungan personal antara kepala kampung / kepala desa baik di Indonesia dan Malaysia menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antar negara. "... dan itu bisa diselesaikan oleh diplomasi sosial tidak lewat diplomasi resmi, diplomasi akar rumputlah. Artinya ada hubungan personality antara kepala kampung. Di sana ada kepala kampung di sini ada kepala kampung, di sini ada kepala desa di sana ada kepala desa kita bangun hubungan yang baik ada komunikasi yang baik sehingga masalah- masalah dalam tanda kutip tindak pidana ringan ... yaaa walaupun hal tersebut sudah masuk dalam tindak pidana berat sebenarnya ya dan sudah melanggar hukum internasional, tetapi bisa diselesaikan. Tanpa harus lewat jalur resmi atau lewat jalur hukum. Karena kalau sudah masuk jalur hukum jalur formal ini akan gengsi-gengsi kan?" (Willy, 2019). Selain EPG dan KK Sosek Malindo (jika aktor subnasional yang terakhir dapat disebut pakar), terdapat sebuah komunitas epistemic yang dengan sengaja dibentuk sebagai tink tank utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP yaitu MRC atau Malindo Research Center. Sayangnya, belum lagi sempat terbentuk secara resmi institusi ini tidak dapat sepenuhnya hadir guna menjembatani negara dan masyarakat perbatasan dalam mengambil kebijakan perbatasan dan relasi perbatasan. MRC yang sedianya merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah universitas yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada tersebut harus menyerah pada kerumitan birokrasi terkait pendanaan dan atau struktur pengelolaan kerjasama antara MRC dan BNPP Kerjasama antara UGM UUM dan BNPP dimulai dengan adanya lokakarya bersama. ... Lalu kita cari apa yang bisa kita kerjamakan melalui diskusi internal. Ditemukanlah isu perbatasan karena pada saat yang bersamaan BPNPP mengusulkan agar UGM masuk ke dalam konsorsium 10. Tetapi konsorsium itu tidak jalan (Universitas mitra BNPP) Persoalannya BNPP menghendaki ada yang menjadi koordinator diantara 10 universitas tersebut tetapi UGM tidak siap karena pada waktu itu bagi UGM perbatasan itu tidak terlalu penting sehingga delegasi yang dikirim bukan delegasi yang cukup kompeten dalam bidang perbatasan .. selanjutnya kerjasama itu diperluas bukan hanya dengan UGM UUM dan BNPP tetapi ada konsorsium universitas di Malaysia ,ada konsorsium universitas di Indonesia ada lembaga riset bersama, dan lembaga riset itu nanti akan menjadi tink tanknya KK Sosek Malindo ... Semuanya sudah siap tinggal pendanaan dan penyelenggaraan. Konsep itu tinggal sedikit saja (Haryono, 2017) MRC tidak lagi bergaung, namun MoU antara UGM dan BNPP sejak tahun 2011 tersebut masih dilanjutkan oleh Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi dan Daerah Perbatasan, Fakultas Geografi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM. Dengan demikian komunitas epistemic pada isu perbatasan masih memiliki akses dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal perbatasan salah satunya adalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia Malaysia. Meski hanya menyoal pembangunan kawasan perbatasan dan garis batas, setidaknya komunitas tersebut memberikan landasan berpijak yang lebih baik bagi BNPP untuk mengelola kawasan perbatasan Indonesia. Hal ini juga nantinya menjadi pondasi bagi pembangunan relasi / diplomasi bilateral yang lebih baik bagi Indonesia dan Malaysia. Komunitas epistemic lain terwadahi melalui Malindo Nusantara Research Center yang didirikan oleh Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dan masyarakat melalui penelitian, publikasi dan konsultasi. Ia juga diproyeksikan untuk meningkatkan hubungan bilateral dua negara Indonesia dan Malaysia dalam konteks hubungan antar pemerintah dan people to people. Namun, dalam proyek yang dikerjakannya nampak belum menyoal isu perbatasan Indonesia Malaysia (Lihat Malindo Nusantara Research Center. <http://malindo.umy.ac.id/current-projects/>). Merujuk pada aktifitas tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa intensitas relasi antar komunitas epistemic dan membuat kebijakan masih rendah. Hal ini juga dapat dilihat pada minimnya pro border policy yang dihasilkan pada kawasan perbatasan, khususnya di Desa Temajak, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari wawancara yang dilakukan oleh terhadap sejumlah penduduk dan perangkat desa, pembangunan jalan baru dilakukan pada tahun 2011 hingga saat ini belum selesai,. Jalan selebar 8 meter tersebut masih kering dan berdebu di musim kemarau dan becek di musim penghujan. Meski demikian, setidaknya jalan ini dapat menghubungkan masyarakat Desa Temajak dengan Kecamatan Paloh yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui pantai yang ketika air pasang mereka tidak dapat melewati jalan tersebut.

Pasokan listrikpun hanya diperoleh pada pukul 6 sore hingga 6 pagi sementara tidak ada satu operator telepon Indonesia yang dapat diakses. Dengan demikian, ketergantungan tidak hanya pada bahan pokok tetapi akses juga pada kasus komunikasi. Gambar 1 Akses Jalan ke Temajuk Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Lemahnya Komunikasi Intersubjektif Komunikasi intersubjektif menjadi salah satu ujung tombak komunitas epistemik dalam memengaruhi pemerintah tetapi juga aktor non negara dan atau publik. Melalui tulisan dan diskusi ilmiah, isu perbatasan dan solusi terkait isu tersebut dapat dicapai. Diseminasi ilmiah melalui media massa, new media dan jurnal menjadi jembatan bagi setiap aktor yang terlibat didalamnya untuk mengakses informasi dan belajar serit berkomitmen atas pendekatan dan arah pengelolaan perbatasan negara. Sayangnya, dari studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sejumlah tulisan mengenai Camar Bulan terdapat kesimpangsiuran informasi atau ketidakjelasan informasi mengenai letak dan situasi Camar Bulan serta persoalan Camar Bulan itu sendiri. Pada sejumlah riset dan juga jurnal nama Tanjung Datu seringkali dipergunakan untuk menyebut kawasan sengketa seluas 1.499 ha. Penggunaan nama ini seringkali membingungkan di lapangan karena sesungguhnya kawasan yang berada pada [perbatasan Indonesia Malaysia di wilayah Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat](#) tersebut berada pada Dusun Camar Bulan. Pada faktanya Tanjung Datu merupakan kawasan perbatasan Indonesia pada lokasi paling ujung yang berbatasan dengan laut. Tanjung Datu berupa pegunungan dan hutan dan tidak berpenghuni karena konturnya yang sulit untuk dilalui bahkan ditinggali. Kawasan yang disebut sebagai Tanjung Datu itu sendiri sesungguhnya merujuk sebuah enclave yang menjorok ke arah area teritorial Indonesia. Sementara bagi masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Paloh sendiri menyebut kawasan tersebut sebagai Camar Bulan (karena berada berbatasan dengan Dusun Camar Bulan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas). Sangat mengherankan bagi mereka mereka yang tinggal di Desa Temajuk jika sejumlah literatur bahkan menyebutkan bahwa pada kawasan Tanjung Datu terdapat penduduk seperti pada tulisan Purwo Mursito pada Jurnal Kearsipan tahun 2012. Dalam jurnal tersebut Mursito menyebutkan bahwa ".... Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa" (Mursito, 2012). [Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara](#) Kemhan RI Hartind Asrin yang menyebutkan bahwa "[Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² \(jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa\) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Bulan dan Dusun Maludin](#) (Anon, "Pemerintah Bahas Perbatasan RI - Malaysia", 2011). Mengacu pada dokumen Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional yang kemudian dirujuk oleh M. Fatmasari dan dimuat dalam repository Universitas Hasanudin menunjukkan sebuah peta dengan judul "Masalah Tanjung Datu" seperti yang terlihat pada Gambar 2 (Fatmasari, 2018). Peta tersebut menunjukkan enclave yang menjorok ke arah Indonesia dari sejumlah titik batas. Peta agak terlihat kabur namun judul pada peta menunjukkan bahwa persoalan yang dimaksudkan sebagai Tanjung Datu bukanlah persoalan yang ada titik paling ujung dari perbatasan Indonesia Malaysia melainkan enclave yang berbatasan dengan Malaysia pada Dusun Camar Bulan. Gambar 2 Tanjung Datu versi Fatmasari Sumber: M. Fatmasari (2018) http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB_VI.pdf Peta yang nampak lebih jelas dan merujuk pada enclave yang sama ditemukan pada buku [Suryo Sakti Hadiwijoyo](#) yang berjudul [Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional](#) terbitan [Graha Ilmu](#). Pada peta yang dimuat dalam buku tersebut juga menunjukkan area yang bernama Tanjung Datu pada enclave yang lebih dikenal sebagai Camar Bulan oleh warga dan pemerintah lokal (Lihat Gambar 3). Pada peta yang dipakai oleh Hadiwijoyo dalam bukunya tersebut juga merujuk pada enclave yang sama yaitu enclave yang berada pada titik A.88 hingga A.156. Sementara panah pada peta di kanan bawah menyebutkan kawasan tersebut bernama Tanjung Datu (Hadiwijoyo, 2011). Gambar 3. Tanjung Datu versi Hadiwijoyo Sumber: Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011.)

Sejumlah artikel pada jurnal pun memuat nama Tanjung Datu pada enclave terkait, Salah satunya adalah artikel hasil riset Istiqamah pada Jurnal Pertahanan dan Bela Negara yang menyebutkan, "Aktor dan upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada pertemuan JIM tahun 2001 dan Special Meeting tahun 2002 bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara Indonesia yakni kedaulatan wilayah NKRI. Pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia oleh pihak Indonesia pada saat itu didasari landasan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih wilayah sebesar 1499 ha karena hasil penulisan yang memperlihatkan bahwa segmen Tanjung Datu datar dan terjadi kesalahan metode pengukuran yang dilakukan pada tahun 1975-1978. Akan tetapi, Indonesia harus menerima kenyataan kalau pihak Malaysia tidak memiliki keinginan untuk merundingkan segmen Tanjung Datu kembali karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat terhadap hasil pengukuran dan menandatangani MOU Tahun 1978 (Istiqamah, 2017). Sementara artikel Mursito menunjukkan pada penamaan yang lebih jelas dengan membedakan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Dalam artikel tersebut, Mursito menunjukkan ada dua wilayah berbeda yang disinggulkan yaitu [Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m³ di Provinsi Kalimantan Barat](#). Mursito pun mempergunakan peta yang lebih jelas dengan membedakan keduanya meski tidak memberi petunjuk yang jelas pada peta tersebut mana area Camar Bulan dan mana area Tanjung Datu (Mursito, 2012). Meski demikian, pada bagian bawah peta diberikan keterangan sebagai Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk (Lihat Gambar 4). Gambar 4. Tanjung Datu versi Mursito Sumber: Mursito (2012) Merujuk pada Mursito (2012) bahwa patok yang menentukan kawasan sengketa Camar Bulan adalah patok nomor A.88. hingga A.156 dan hal tersebut merujuk pada enclave yang disebut sebagai Tanjung Datu oleh sejumlah penulis dan bahkan dokumen milik Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya dalam laporan penelitian ini kawasan sengketa yang dimaksudkan adalah enclave yang menjorok ke arah Indonesia tersebut sebagai Camar Bulan. Sementara Tanjung Datu merujuk pada kawasan paling ujung di bagian utara Desa Temajuk yang berupa gunung. Kawasan ini menjadi sengketa ketika Malaysia membangun mercusuar yang diyakini berada di kawasan Indonesia. Titik pangkal di darat pada kawasan ini menjadi sangat penting untuk menentukan batas laut Indonesia Malaysia yang hingga saat ini masih belum disepakati akibat Gosong Niger / Niger Banks tidak lagi terlihat sebagai titik terluar dari daratan Indonesia. Meski demikian, pada laporan penelitian ini masih dipakai penyebutan Tanjung Datu sebagai sebutan umum yang seringkali dipakai untuk merujuk kawasan sengketa Camar Bulan. Dari beberapa artikel tersebut merujuk pada dua tempat yang berbeda yaitu kawasan Tanjung Datu yang berada di ujung utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan sebagian kawasan Camar Bulan berupa enclave seluas 1.449 ha. Kedua kawasan ini juga memiliki topografi yang berbeda, jika Tanjung Datu berupa pegunungan sementara Camar Bulan merupakan dataran rendah. Di kedua kawasan tersebut tidak ditemukan penduduk seperti yang disebutkan oleh Mursito (2012). Penduduk tidak tinggal di Tanjung Datu karena Tanjung Datu merupakan pegunungan yang tidak memiliki akses jalan kecuali lewat laut. Sementara enclave Camar Bulan merupakan hutan yang bagi Malaysia kawasan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. Jikapun ada sebagian warga Indonesia yang berada di enclave tersebut hayalah untuk berlandas saja. Sedikit berbeda pada artikel Simela Victor Muhamad pada Jurnal P3DI yang menyebutkan bahwa persoalan Tanjung Datu adalah persoalan yang merujuk pada perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1891 dimana di [dalam OBP Tanjung Datu terdapat Dusun yang bernama Camar Bulan](#). Isu pertama menyangkut penentuan titik perbatasan. Meski telah mengadopsi dan mengaukai perjanjian perbatasan Inggris dan Belanda di Borneo pada 1891, di sejumlah titik Indonesia-Malaysia masih saling klaim (OBP). Ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan, salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Di sanalah lokasi Dusun Camar Bulan berada (Muhamad, 2011). Penyebutan Tanjung Datu pada area Camar Bulan saat ini mungkin juga tidak terlalu keliru jika merujuk pada Konvensi yang menjadi dasar dari upaya untuk menarik garis batas antara Indonesia Malaysia saat ini. Pada dokumen yang disebut sebagai Traktat London 1891 tersebut menyebutkan bahwa perbatasan antara Inggris dan Belanda di Kalimantan Barat didasarkan atas watershed yang ditarik dari Pulau Sebatik dan berakhir di kawasan Tanjung Datu. Pada bagian utara watershed berada di bawah yurisdiksi Inggris dan kawasan yang berada di sebelah selatan watershed berada di bawah yurisdiksi Belanda. "the boundary-line shall follow the watershed of the rivers running to the south- west and west coasts, north of Tanjung Datoe, and of those running to the west coast south of Tanjung Datoe, the south coast, and the east coast south of 4 ' 10" north latitude" (Rizki, 2018, p. 410). Dari International Boundary Study (1965) Traktat London tersebut diterjemahkan merujuk pada apa yang telah diaplikasikan di lapangan. Studi ini juga tidak mempergunakan 'Camar Bulan' melainkan Tanjung Datu (The Geographer, 1965). Ia menyebutkan bahwa penerapan traktat tidak mudah di lapangan karena persoalan interpretasi dan kondisi lapangan yang tidak selalu sejalan dengan watershed sehingga tidak jarang batas ditarik berdasarkan watershed dan atau garis tengah tenggan sungai. The boundary starts on the east coast at latitude 4° 10' N. After the island of Sebatik is divided, the boundary crosses the waters between the island and the mainland in a sinuous line following the median of the Tamboe and Sikapal channels to the Sikapal range which forms the water divide between the Serudong and Simengaris rivers. The water divide is

followed generally westward to 116° 49.9' E. where the Seboeda River is crossed. Mounting the minor water divides, the boundary continues westward to 116° 42.3' E. where the Agisan River, a tributary of the Seboekoe, is also intersected. In like manner, the boundary meanders westward to 116° 26.2' E. where the Pantjangan River, an upper course of the Sembakoeng, is also crossed. The intersections of these three rivers with the boundary are marked with pillars. Continuing westward, the boundary intersects the Sesai River at approximately 116° 09' E. All four of these intersections take place along the parallel of latitude 4° 20' as specified in the original Anglo-Dutch treaty. From the last-named river crossing, the boundary mounts the ridgeline which constitutes the major water divide, and this feature serves as the border for approximately 800 miles. In places, knowledge of the precise location of the divide is rather scanty. Southward of Kuching, the water divide is abandoned between the peaks of Api and Raja. Over a straight line distance of 13.6 miles between the peaks, the boundary follows a complicated course utilizing straight lines, foot paths, streams, water divides, and a crest line. The boundary, where it follows a stream, has been defined as the right bank of the specific stream. Pillars, either of wood or concrete, mark the major turning points. The stretch along the boundary measures approximately 19.75 miles. On the peak of Api mountain, the boundary returns to the water divide for an additional 78 miles northward and then northward to the South China Sea at Tanjung Datu (The Geographer, 1965, pp. 7-8). Batas dimulai di pantai timur pada garis lintang 4° 10' N yang membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Garis Batas berlanjut melintasi perairan antara pulau dan daratan secara berliku dengan mengikuti garis tengah/median alur Tamboe dan Sikapal ke bentang Sikapal yang membentuk pembagian air antara sungai Serudong dan Simengaris. Pembagian air berlanjut ke barat hingga ke 116° 49,9' E. di mana Sungai Seboeda dilintasi. Batas negara dilanjutkan hingga ke 116° 42,3' E. di mana Sungai Agisan, anak Sungai Seboekoe berpotongan. Dengan cara pembagian yang sama, batas berliku ke barat ke 116° 26,2' E. di mana Sungai Pantjangan, bagian atas Dari Sungai Sembakoeng, juga dilintasi. Melanjutkan ke barat, batas memotong Sungai Sesai pada sekitar 116° 09' E. Keempat persimpangan ini berlangsung sepanjang paralel lintang 4°20' sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Inggris-Belanda asli. Dari penyeberangan sungai yang disebut terakhir, batas tersebut naik punggung bukit yang merupakan pembagian air utama, dan fitur ini berfungsi sebagai perbatasan untuk sekitar 800 mil. Di barat daya Kuching, pembagian air diabaikan hingga puncak Api dan Raja. Jarak 13,6 mil antara kedua puncak ditarik garis rumit dengan memanfaatkan garis lurus, jalur kaki, aliran, membagi air, dan puncak. Sebagian ditandai dengan pilar apakah dari kayu atau beton sepanjang 19,75 mil. Setelah puncak Api, batas kembali mempergunakan pembagian air sepanjang 78 mil barat laut dan kemudian ke utara ke Laut Cina Selatan di Tanjung Datu (The Geographer, 1965, pp. 7-8). Meski demikian, penyebutan tersebut harus diperjelas mengingat perkembangan penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia masih terus berlangsung dengan lebih mendetail pada kawasan-kawasan tertentu. Traktat ini masih meninggalkan 10 OBP bagi Indonesia (masalah Camar Bulan yang sementara diterima pada tahun 2011 atau belum diratifikasi) dan 9 OBP bagi Malaysia (karena menganggap bahwa isu enclave Camar Bulan telah selesai). Ketidaktelitian semacam ini seringkali mengakibatkan kekeliruan dan informasi yang tidak tepat bagi masyarakat umum yang tidak memahami persoalan perbatasan secara mendalam dan mengakibatkan sentiment negatif yang tidak perlu yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia. Isu Tanjung Datu sendiri nampaknya lebih merujuk pada persoalan Gosong Niger yang juga nampaknya belum nampak diketahui oleh publik. Gosong yang tidak dapat dipakai sebagai titik penarikan garis batas tersebut seringkali masih dipahami dapat dipakai sebagai titik penarikan garis perbatasan laut jika Gosong tersebut tidak terkena abrasi (Gosong masih dipahami sebagai pulau) (Saidi, 2019). Meski I Made Arsana dalam beberapa tulisannya telah menyinggung garis batas negara di Gosong Niger, kerumitan isu ini menjadikannya tidak menarik bagi publik untuk mau memahami dan lalu mengerti situasi konflik perbatasan yang ada. Penutup Komunitas epistemik merupakan faktor penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan konflik perbatasan yang tidak mudah dipahami oleh publik. Komunitas epistemik juga merupakan faktor pendukung bagi katalisator pembangunan kawasan perbatasan dan pengelolaan konflik perbatasan. Dengan kata lain ia juga menjadi titik sentral utama pemerintah dalam relasi antar negara. Dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, pengaruh komunitas epistemik tersebut belum cukup signifikan baik dan dalam pembentukan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan maupun pengelolaan konflik perbatasan. Melalui dua bentuk komunitas epistemik yaitu yang terlembagakan dan bersifat individu terdapat dua poin penting yang belum dapat dipenuhi yaitu intensitas relasi antara komunitas epistemik dengan pembuat kebijakan dan rendahnya komunikasi intersubjektif yang terjadi diantara pakar perbatasan melalui tulisan. Akibatnya tidak saja pro border policy yang lambat berjalan, namun juga kesimpangsiuran informasi semakin memperburuk situasi pengelolaan relasi antara negara dalam isu perbatasan negara. Nampaknya, komunitas epistemik harus semakin diperkuat baik melalui kelembagaan maupun komunikasi intersubjektif baik melalui tulisan dan diskusi ilmiah. Intensitas hubungan antara komunitas epistemik dan negara sudah saatnya ditingkatkan melalui kerjasama riset dan penyusunan roadmap pembangunan kawasan perbatasan. Kehadiran mereka di tengah publik yang awam mengenai isu perbatasan namun cepat 'panas' dalam menghadapi isu perbatasan sangat diperlukan guna menghidupkan proses belajar. Dengan demikian, komunitas epistemik mampu menjadi katalisator yang sempurna bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Bibliografi Anon. (2011, October 14). "Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan". Retrieved October 12, 2019, from Berita Satu.Com: <https://www.beritasatu.com/nasional/13543/camar-bulan-dan-tanjung-datu-harus-dipertahankan> Anon. (2011, Oktober 11). "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat". Retrieved Oktober 12, 2019, from Berita Satu.Com: <https://sp.beritasatu.com/home/dikabarkan-dicaplok-malaysia-aktivitas-tni-di-camar-bulan-meningkat/12277> Anon. (2011, Oktober 10). "Pemerintah Bahas Perbatasan RI - Malaysia". Retrieved Oktober 12, 2019, from Merdeka.Com: <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html> Bayuni, E. (2009, Oktober). "Media Telah Menjadi Bagian Dari Suatu Proses Politik Yang Kontra Produktif". Retrieved Oktober 12, 2019, from Jurnal Diplomasi: [http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2009/DIPLOMASI Oktober 2009.pdf](http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2009/DIPLOMASI%20Oktober%202009.pdf) Crawford, N. C. (2010). "Jurgen Habermas". In J. E. Williams, Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Yogyakarta: Penerbit Baca. Dunlop, C. A. (2011). "Epistemic Communities". In E. A. (ed), Routledge Handbook of Public Policy. University of Exeter, UK. Fatmasari. (2018). "Memorandum Of Understanding Of Demarcation Survey Of International Boundary Between The Government Of Indonesia And The Government Of Malaysia 1976 Dalam Survei Dan Demarkasi Antara Indonesia Dan Malaysia". Retrieved Oktober 12, 2019, from Repository Universitas Pasundan: [http://repository.unpas.ac.id/33730/4/BAB I.pdf](http://repository.unpas.ac.id/33730/4/BAB%20I.pdf) Gultom, A. (2011, Oktober 9). "TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua". Retrieved Oktober 12, 2019, from Kantor Berita Politik RMOL.ID: <https://rmol.id/dpr/read/2011/10/09/41852/> Haas, P. M. (1992). "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination". International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy, 1-35. Hadiwijoyo, S. S. (2011). Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Yogyakarta.: Graha Ilmu. Harun. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Camar Bulan. (I. Rachmawati, Interviewer) Haryono, D. E. (2017). Salah Satu Penggagas MRC. (I. Rachmawati, Interviewer) Herlin. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Camar Bulan. (I. Rachmawati, Interviewer) Hidayat, F. (2016, July 20). "28 Desa di Nunukan Terancam Dikuasai Malaysia?". Retrieved October 12, 2019, from Tempo.Co: <https://nasional.tempo.co/read/789127/28-desa-di-nunukan-terancam-dikuasai-malaysia> Ibrahim. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Maludin. (I. Rachmawati, Interviewer) Istiqamah. (2017). "Indonesia Defence Diplomacy To Make Tanjung Datu Segment As Outstanding Boundary Problem Of Indonesia-Malaysia". Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Vol 7, No 3. Madu, L. (2008). "Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet". Global & Strategis, Th. II, No. 1, Januari - Juni 2008, 1-22. Mai'a, K. D. (2013). "Re-thinking Epistemic Communities Twenty Years Later". Forthcoming Review of International Studies, Volume 39 / Issue 01 / January 2013. Maidin, D. S. (2007). Rangkaian Seminar dan Diskusi Panel Refleksi 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Malaysia di UNPAD. Bandung: UNPAD. Maksun, A. d. (2014). "Ketengangan Hubungan Indonesia -Malaysia dalam Isu Tarian Pendet". Kajian Malaysia, Vol. 32, No. 2, 2014, 41-72. Muhamad, S. V. (2011, Oktober). "Masalah Perbatasan Indonesia Malaysia. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. III, No. 20/II/P3DI/Oktober/2011. Mursito, P. (2012). "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". Jurnal Kearsipan. VOL 7/ANRI/12/2012. Rachmawati, I. d. (2012). "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 16. No.2. Rengger, N. (2000). International Relations, Political Theory and the Problem of Order, Beyond International Relation Theory. New York: Routledge Publication. Rengger, N. (2000). International Relations, Political Theory and the Problem of Order, Beyond International Relation Theory. New York: Routledge Publication. Richard, D.

